

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas dan konflik sosial masih menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat perkotaan, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, Jakarta juga menghadapi berbagai persoalan sosial di tingkat komunitas, seperti tawuran remaja, penganiayaan, hingga peredaran narkoba. Beberapa peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain kasus pengeroyokan dan penusukan terhadap warga yang mencoba meleraikan perkelahian (Wildan Noviansah, 2025), kegagalan tawuran remaja bersenjata tajam di Johar Baru (Khaerul Izan, 2025), serta pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh aparat kepolisian (Bidhumas Polda Metro Jaya, 2025). Peristiwa – peristiwa tersebut mencerminkan melemahnya mekanisme pengendalian sosial di tingkat komunitas dan menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memahami faktor – faktor yang memengaruhi kemampuan warga dalam menjaga ketertiban lingkungannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.676 kejadian kriminal di Jakarta Pusat dengan tingkat penyelesaian perkara sebesar 64,8%. Data ini, menunjukkan masih terjadi kasus kriminal yang belum terselesaikan dan berpotensi memengaruhi rasa aman masyarakat. Dalam kasus ini, kita dapat melihat kondisi konflik sosial juga terjadi di kawasan pemukiman padat yaitu kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat dengan kepadatan penduduk mencapai 43.687 Jiwa/ km^2 . Wilayah ini memiliki tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi dan tidak jarang diwarnai konflik antarmasyarakat. Wilayah Johar Baru ini juga merupakan wilayah terpadat se – Asia Tenggara dengan kepadatan penduduk rata – rata 60.433/ km^2 dan jumlah penduduknya tercatat sebanyak 143.227 Jiwa (Prabawa dkk., 2019). Kepadatan penduduk yang tinggi di Johar Baru berkaitan dengan persoalan sosial, seperti lingkungan padat dan kumuh, kesenjangan sosial - ekonomi, pengangguran serta rendahnya kualitas SDM.

Wilayah Johar Baru juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki kerawanan konflik sosial, khususnya tawuran antarkelompok warga. Tingginya angka pengangguran menyebabkan aktivitas keseharian warga hanya berkumpul di pinggir jalan atau gang, dan kondisi tersebut kerap memicu kesalahpahaman antarwarga yang berujung pada tawuran (Sumarno, 2014). Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah perilaku menyimpang di lingkungan tempat tinggalnya, serta faktor – faktor apa yang menentukan kuat atau lemahnya kemampuan tersebut.

Fenomena konflik dan kriminalitas di lingkungan perkotaan sering dijelaskan melalui *social disorganization theory* yang dikemukakan oleh Shaw dan McKay. Teori Disorganisasi sosial menjelaskan bahwa kondisi lingkungan seperti kepadatan penduduk, kemiskinan dan tingginya mobilitas sosial dapat melemahkan kemampuan masyarakat dalam mengontrol perilaku menyimpang (Kubrin & Wo, 2015). Dalam teori tersebut, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh aparat formal, tetapi juga melalui *Informal Social Control*. *Informal Social Control* merujuk pada kemampuan masyarakat dalam pengawasan sosial, teguran terhadap perilaku menyimpang dan keterlibatan dalam kehidupan komunitas. Konsep ini berkaitan dengan *Collective Efficacy*, yaitu kondisi ketika warga memiliki kohesi sosial atau kepercayaan timbal balik (*Social Cohesion*) dan kesediaan bersama untuk menjaga kepentingan umum (*Informal Social Control*) (Duncan dkk., 2003).

Duncan (2003) menyatakan hasil penelitian terdahulu, dimana faktor lingkungan paling menonjol secara signifikan adalah kekerasan/*violent crime*. Dapat disimpulkan *Collective Efficacy* yang rendah cenderung memiliki *Informal Social Control* yang lemah sehingga lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan (Duncan dkk., 2003). Temuan ini diperkuat dalam jurnal Kubrin & Wo (2015) mendapatkan hasil temuan dimana *Collective Efficacy* berpengaruh negatif yang kuat dan independen terhadap *violent crime* (Kubrin & Wo, 2015). Dalam konteks di Indonesia juga menemukan penelitian terhadap kohesivitas kelompok dimana kelompok yang kohesif cenderung tetap bersatu untuk mencapai tujuan bersama, serta berpengaruh pada komitmen anggota dalam berorganisasi (Murniati &

Mohammad Salehudin, 2021). Temuan – temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara awal bersama Ketua RT di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat menunjukkan adanya penurunan partisipasi warga dalam kegiatan sosial, keengganan masyarakat menegur perilaku menyimpang sebelum konflik terjadi, serta semakin terbatasnya interaksi antarwarga akibat lingkungan yang semakin padat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan kepadatan lingkungan turut berkontribusi dalam melemahnya *Informal Social Control* di wilayah tersebut.

Selain dipengaruhi faktor lingkungan sosial, keengganan seseorang untuk melakukan intervensi dalam situasi konflik juga dapat dijelaskan melalui *bystander effect* yang dikemukakan oleh Darley dan Latané. Teori *bystander effect* menjelaskan dimana kehadiran banyak orang memungkinkan untuk menurunkan atau melemahkan pertolongan ketika di keadaan darurat lewat konsep *Diffusion of Responsibility*, yaitu kondisi ketika individu merasa tanggung jawabnya terbagi kepada orang lain (Darley dan Latané, 1968) Dalam lingkungan permukiman padat, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat menjadi lebih enggan untuk menegur, membantu, atau melakukan intervensi terhadap perilaku menyimpang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas *Informal Social Control* di lingkungan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Informal Social Control* memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan perkotaan. Salah satunya dalam penelitian Sampson et al. (1997) menunjukkan bahwa lingkungan dengan kohesi sosial yang tinggi dan kesediaan warga untuk melakukan intervensi sosial, cenderung memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah (J. Sampson Robert dkk., 1997). Temuan tersebut juga didukung oleh Linning dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa *Informal Social Control* merupakan peran yang sangat penting karena mekanisme pengendalian sosial yang muncul melalui interaksi sosial, kepedulian antarwarga, serta kesediaan masyarakat untuk melakukan intervensi terhadap perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban lingkungan (Linning dkk., 2024). Oleh karena itu, hubungan sosial yang kuat dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan bermasyarakat dapat memperkuat efektivitas *Informal Social Control* dalam mencegah berbagai bentuk perilaku menyimpang.

Namun, efektivitas *Informal Social Control* tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan sosial, tetapi juga oleh kondisi fisik lingkungan. Dalam konteks perkotaan yang padat, kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, dan tingginya intensitas interaksi antarwarga dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap lingkungan yang padat dapat menimbulkan berbagai respons psikologis negatif, seperti ketidaknyamanan, peningkatan persepsi risiko, serta emosi negatif yang memengaruhi pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kim dan Kang (2021) menemukan bahwa *Perceived Crowding* berkaitan dengan meningkatnya persepsi risiko dan memengaruhi pola partisipasi individu dalam aktivitas sosial (Kim & Kang, 2021a). Sementara itu, Zhang dkk. (2023) menunjukkan bahwa *Perceived Crowding* pada ruang publik perkotaan dapat memunculkan emosi negatif yang berpotensi memengaruhi kualitas interaksi sosial antarindividu (Zhang dkk., 2023).

Dalam psikologi lingkungan, *Perceived Crowding* dipahami sebagai pengalaman psikologis ketika individu merasa ruang yang tersedia tidak memadai sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, tekanan sosial, maupun stres psikologis (Altman, 1975). *Perceived Crowding* tidak hanya ditentukan oleh jumlah individu yang berada dalam suatu ruang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, karakteristik lingkungan, serta penilaian subjektif individu terhadap kondisi di sekitarnya. Dengan demikian, *crowding* merupakan pengalaman psikologis yang bersifat subjektif dan dapat berbeda pada setiap individu meskipun berada pada tingkat kepadatan yang sama (Zhang dkk., 2023).

Fenomena tersebut relevan dengan kondisi di Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Salah satu kawasan yang menggambarkan kondisi tersebut adalah Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang memiliki rumah berdekatan, gang sempit, dan keterbatasan ruang hunian. Bahkan, sebagian warga dilaporkan memilih tidur di luar rumah atau di balai warga karena keterbatasan ruang pribadi (Danica Adhitiawarman, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ruang fisik dapat memengaruhi pengalaman subjektif masyarakat terhadap kepadatan lingkungan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa *Perceived Crowding* berkaitan dengan menurunnya kesejahteraan psikologis masyarakat perkotaan. Gusmini dan Tetteng (2023) menemukan bahwa persepsi kesesakan yang tinggi berhubungan dengan rendahnya *psychological well-being* pada penghuni rumah susun di Makassar (Gusmini Gusmini & Basti Tetteng, 2023). Di sisi lain, Zefanya dan Pelupessy (2025) melaporkan bahwa *crowding perception* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan hidup masyarakat di Jakarta (Singgya Zefanya & Chresthover Pelupessy, 2025). Temuan diatas menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kesesakan terhadap individu dapat bervariasi tergantung pada karakteristik lingkungan dan faktor psikososial yang terlibat. Meskipun berada dalam kondisi lingkungan yang sama, respons individu terhadap konflik sosial dapat berbeda-beda. Salah satu faktor psikologis yang diduga memengaruhi respons tersebut adalah regulasi emosi (*emotion regulation*). Gross (1998) menjelaskan bahwa regulasi emosi merupakan proses individu dalam mengelola emosi yang dirasakan, kapan emosi muncul, dan bagaimana emosi tersebut diekspresikan (Gross dkk., 1998).

Dalam *Process Model of Emotion Regulation*, Gross dan John (2003) membedakan dua strategi utama regulasi emosi, yaitu *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression*. *Cognitive reappraisal* merupakan strategi yang bersifat adaptif karena melibatkan upaya mengubah cara berpikir terhadap suatu situasi sebelum respons emosional muncul, sedangkan *expressive suppression* dilakukan dengan menekan ekspresi emosi yang telah dirasakan (Gross & John, 2003). Penggunaan strategi regulasi emosi yang adaptif berkaitan dengan kemampuan kontrol diri yang lebih baik serta respons sosial yang lebih konstruktif. Temuan ini didukung oleh penelitian Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) yang menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *self-control* yang tinggi cenderung memiliki penyesuaian diri yang lebih baik, tingkat masalah psikologis yang lebih rendah, serta hubungan interpersonal yang lebih positif. Sebaliknya, kemampuan regulasi emosi yang kurang adaptif sering dikaitkan dengan impulsivitas, agresivitas, dan meningkatnya konflik interpersonal (Tangney dkk., 2004).

Dalam lingkungan permukiman padat, kemampuan regulasi emosi dapat memengaruhi bagaimana individu merespons konflik sosial yang terjadi di sekitarnya. Individu dengan regulasi emosi yang baik cenderung lebih mampu merespons konflik secara rasional dan konstruktif serta mendukung praktik *informal social control*. Sebaliknya, individu dengan regulasi emosi yang rendah lebih rentan bereaksi impulsif atau memilih menghindari intervensi sosial.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa *perceived crowding* dapat memengaruhi kondisi psikologis individu serta kualitas interaksi sosial, penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control* masih sangat terbatas, terutama dalam konteks permukiman padat di Indonesia. Penelitian terdahulu seperti Kim dan Kang (2021) hanya mengkaji pengaruh *perceived crowding* terhadap persepsi risiko dan partisipasi aktivitas sosial secara umum, bukan pada perilaku kontrol sosial spesifik seperti *informal social control* (Kim & Kang, 2021). Sementara itu, Sampson dkk. (1997) dan Linning dkk. (2024) yang secara khusus meneliti *informal social control* dan *collective efficacy* tidak mempertimbangkan tekanan lingkungan fisik seperti kepadatan sebagai prediktornya (J. Sampson Robert dkk., 1997; Linning dkk., 2024). Dengan kata lain, belum ada penelitian yang secara langsung menghubungkan pengalaman psikologis *perceived crowding* dengan kecenderungan warga untuk terlibat dalam pengendalian sosial informal, khususnya di kawasan permukiman padat perkotaan Indonesia.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu yang melibatkan regulasi emosi menempatkannya sebagai variabel anteseden atau konsekuensi, bukan sebagai moderator yang memengaruhi kekuatan hubungan antara tekanan lingkungan dan perilaku sosial. Lebih jauh lagi, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan regulasi emosi sebagai skor tunggal, padahal Gross dan John (2003) sendiri menegaskan bahwa dua dimensi utama regulasi emosi yaitu, *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression* merepresentasikan mekanisme yang secara konseptual berbeda dan berpotensi menghasilkan pengaruh yang berlawanan arah (Gross & John, 2003). *Cognitive reappraisal* bersifat adaptif karena melibatkan pemaknaan ulang situasi sebelum respons emosional terbentuk,

sehingga diprediksi dapat memperlemah dampak negatif *perceived crowding* terhadap *informal social control*. Sebaliknya, *expressive suppression* yang bersifat kurang adaptif karena hanya menekan ekspresi emosi tanpa mengubah pengalaman emosional itu sendiri diprediksi dapat memperkuat dampak negatif tersebut. Dengan demikian, menggabungkan kedua dimensi menjadi satu skor tunggal justru berisiko mengaburkan perbedaan dinamika moderasi yang penting ini.

Penelitian ini hadir untuk mengisi tiga kesenjangan tersebut sekaligus. Pertama, secara teoritis, penelitian ini menjadi yang pertama mengintegrasikan perspektif psikologi lingkungan (*perceived crowding*) dengan perspektif sosiologi perkotaan (*informal social control*) dalam satu model yang diuji secara empiris. Kedua, penelitian ini menempatkan regulasi emosi sebagai moderator bukan anteseden atau konsekuensi dan secara khusus menguji kedua dimensinya (*cognitive reappraisal* dan *expressive suppression*) secara terpisah, karena keduanya merepresentasikan mekanisme yang berbeda dan menghasilkan arah moderasi yang berlawanan. Ketiga, dari sisi konteks, penelitian ini berlokasi di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang belum pernah menjadi setting penelitian psikologi komunitas dengan kerangka model ini sebelumnya.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini menduga bahwa semakin tinggi *perceived crowding* yang dirasakan warga, semakin rendah kecenderungan mereka untuk terlibat dalam *informal social control*. Namun, hubungan negatif ini tidak bersifat seragam melainkan dimoderasi secara berbeda oleh dua dimensi regulasi emosi yang dianalisis secara terpisah. Individu dengan *cognitive reappraisal* yang tinggi diprediksi mampu meredam dampak negatif *perceived crowding* sehingga tetap dapat berkontribusi dalam pengendalian sosial lingkungannya. Sebaliknya, individu dengan *expressive suppression* yang tinggi diprediksi justru semakin terhambat untuk terlibat dalam *informal social control* ketika menghadapi tekanan kepadatan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji dua jalur moderasi secara mandiri: peran *cognitive reappraisal* dan peran *expressive suppression* dalam hubungan

antara *perceived crowding* dan *informal social control* pada warga Johar Baru, Jakarta Pusat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, berikut beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi:

- a) Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Johar Baru disertai dengan masih terjadinya berbagai bentuk konflik sosial dan tindak kriminalitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta rasa aman masyarakat.
- b) Melemahnya mekanisme *informal social control* di lingkungan permukiman padat tercermin dari rendahnya partisipasi sosial, kohesi sosial, serta kesediaan warga untuk melakukan intervensi terhadap perilaku menyimpang di lingkungan sekitar.
- c) Adanya kecenderungan *bystander effect* dalam situasi konflik sosial menyebabkan individu enggan terlibat atau melakukan tindakan pencegahan terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban lingkungan.
- d) Tingginya kepadatan fisik dan sosial di kawasan Johar Baru berpotensi memengaruhi kualitas interaksi sosial serta cara individu memandang lingkungan tempat tinggalnya.
- e) *Perceived crowding* sebagai persepsi subjektif terhadap kepadatan lingkungan diduga memengaruhi kecenderungan individu dalam melakukan kontrol sosial informal terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang.
- f) Perbedaan kemampuan regulasi emosi pada setiap individu berpotensi memengaruhi cara individu merespons tekanan lingkungan dan situasi sosial yang muncul akibat kepadatan permukiman.

- g) Masih terbatasnya penelitian di Indonesia yang menguji peran regulasi emosi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control*, khususnya pada konteks masyarakat yang tinggal di kawasan padat perkotaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Guna menjaga fokus penelitian agar tetap terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini dibatasi pada hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control* serta peran regulasi emosi sebagai variabel moderator. Penelitian dilakukan pada masyarakat yang berdomisili di kawasan permukiman padat Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah regulasi emosi berperan sebagai moderator dalam hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control* pada masyarakat Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control* serta menguji peran regulasi emosi sebagai variabel moderator dalam hubungan tersebut pada masyarakat Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a.) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi sosial dan psikologi lingkungan, khususnya terkait *perceived crowding*, *informal social control*, dan regulasi emosi.
- b.) Menambah bukti empiris mengenai hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control* pada masyarakat perkotaan.
- c.) Memperkaya kajian mengenai peran regulasi emosi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara *perceived crowding* dan *informal social control*.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a.) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya regulasi emosi dalam menghadapi tekanan akibat kepadatan lingkungan.
- b.) Menjadi masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kontrol sosial informal serta menjaga ketertiban lingkungan.
- c.) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *perceived crowding*, *informal social control*, dan regulasi emosi pada masyarakat perkotaan.